KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Mendasari ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholders* terhadap pembangunan Kota Pangkalpinang.

Atas tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas peran dan masukanya. Semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam bekerja serta dalam membangun Kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang, Juli 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKALPINANG

Dr. Hj. ETI FAHRIATY, S.Pd.I., M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650724 198703 2 002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Permberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja Perubahan merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS Perubahan dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2020 ini berpedoman pada Renstra OPD dan RPJMD kota, dimana prioritas dan sasaran daerah tersebut mengacu pada prioritas dan sasaran yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2019-2024, RPJMD Prov. Kep. Bangka Belitung dan RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kota Pangkalpinang dan hasil evaluasi penyelenggaraan RPJMD tahun 2018-2023.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerahadalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

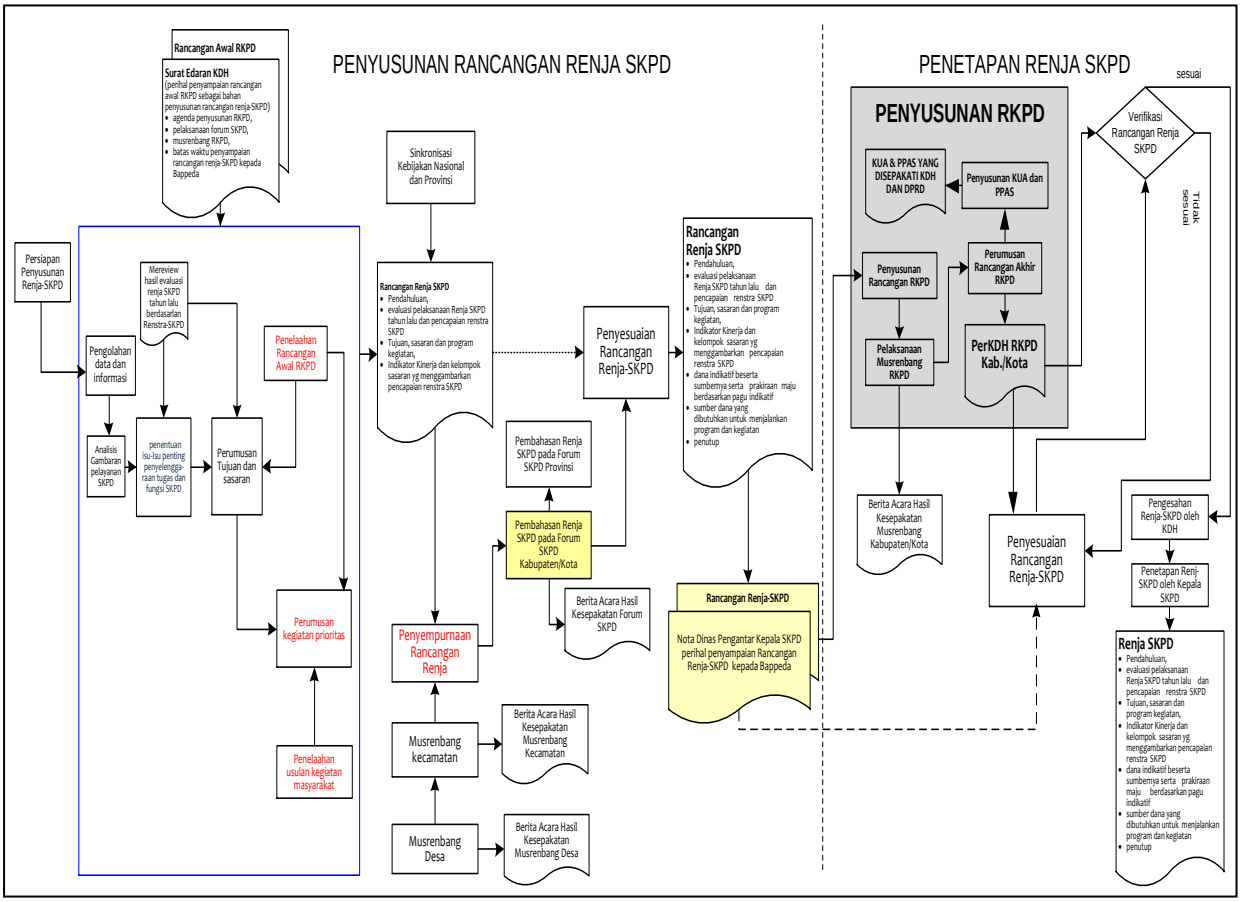

Visi instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama *(shared vision)* yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi. Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang adalah:

"Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM "
(Sejahtera, Nyaman, Unggul, Makmur)

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Permberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, seri E Nomor 03);

19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);

20. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, seri D Nomor 01);

21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);

22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 01);

23. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 15).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2020, dan tujuan Rencana Kerja ini adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS Perubahan) Tahun 2020 sebagai :

1. Perwujudan visi dan misi Walikota Pangkalpinang ke dalam rencana kegiatan pembangunan.
2. Perumuskan program-program prioritas.
3. Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan oleh OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Peubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2020, meliputi :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menjelaskan rincian rencana-rencana kerja OPD dan rincian anggaran untuk menunjang rencana-rencana kerja OPD.

BAB V Penutup

Menjelaskan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada Tabel T-C.29 berikut.

TABEL T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sampai dengan tahun 2020
KOTA PANGKALPINANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Program Renstra Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Capaian Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021	
					Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Terpenuhinya Upaya Pelayanan Administrasi Perkantoran**						**11 Upaya**	**11 Upaya**	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-				12 bulan	12 bulan	100
	Penyediaan jasa perkantoran	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Perkantoran	-	-				12 bulan	12 bulan	100
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	-				12 bulan	12 bulan	100
	Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi ke luar daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	-				12 bulan	12 bulan	100

	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	-	-				12 bulan	12 bulan	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Pembelian ATK	-	-				12 bulan	12 bulan	100
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	-	-				12 bulan	12 bulan	100
	Penyediaan barang dan cetakan dan penggandaan	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-				12 bulan	12 bulan	100
	Penyediaan alat kebersihan kantor	Jumlah Waktu Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	-	-				12 bulan	12 bulan	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Layanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Yang Tertangani	-	-				12 bulan	12 bulan	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	-	-				12 bulan	12 bulan	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	-	-				**5 Upaya**	**5 Upaya**	100
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung/Bangunan/Prasarana Kantor yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	-	-				1 unit	1 unit	100

	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan penunjang perkantoran yang diadakan	-	-				30 unit	30 unit	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin/Berkala	-	-				4 unit	4 unit	100
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Keuangan**						**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	100
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	-	-				1 dokumen	3 dokumen	100
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	-	-				1 dokumen	1 dokumen	100
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	-	-				1 dokumen	1 dokumen	100
	Penyusunan Renja (RKT, RKA, DPA)	Jumlah Laporan Renja, RKA dan DPA yang disusun	-	-				1 dokumen	6 dokumen	100
	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**Skor Nilai KLA**						**70**	**70**	**100**
	Penyusunan Raperda Pemberdayaan Perempuan dan							-	-	-

	Perlindungan Anak									
	Sosialisasi Perda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Jumlah Peserta Sosialisasi	-	-				100 Orang	100 Orang	100
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan di Kota Pangkalpinang	-	-				30 Organisasi	30 Organisasi	100
	Fasilitasi Pengembangan Industri Rumahan	Jumlah IR yang Diberdayakan	-	-				336 IR	336 IR	100
	Peringatan Hari Anak	Terlaksananya Peringatan Hari Anak.	-	-				200 Orang	200 Orang	100
	Pengembangan Forum Anak Skala Kota	Jumlah Peserta Kongres	-	-				90 Orang	90 Orang	100
	Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah Kecamatan Prioritas Program KLA.	-	-				7 Kecamatan	7 Kecamatan	100
	Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Meningkatnya kapasitas PATBM	-	-				10 PATBM	10 PATBM	100
	Fasilitasi Layanan Penanganan Kasus Perempuan dan Anak	Jumlah Kasus Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.	-	-				60 Kasus	60 Kasus	100
	Evaluasi Pelaksanaan PUG	Status Capaian PUG (APE)	-	-				1 Status	1 Status	100
	Workshop PPRG Bagi Perencana OPD	Jumlah OPD yang Menyusun GAP dan GBS.	-	-				31 OPD	31 OPD	100
	Penyediaan Sistem Basis Data Gender dan Anak	Tersedianya Sistem Basis Data dan Gender	-	-				1 Sistem	1 Sistem	100

	Sosialisasi Perda KLA	Jumlah Peserta Sosialisasi	-	-				100 Orang	100 Orang	100
	Pelatihan PPRG Bagi Aparatur Perencana di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang menyusun GAP dan GBS	-	-				20 Kel	20 Kel	100
	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PUG	Jumlah lembaga yang dikuatkan	-	-				1 Lembaga	1 Lembaga	100
	Fasilitasi Pembentukan Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Terbentuknya Forum KKG	-	-				1 Unit	1 Unit	100
	Rakor PUG	Jumlah Rakor PUG yang dilaksanakan	-	-				31 OPD	31 OPD	100
	Pendampingan Perempuan Untuk Pengembangan Ekonomi Rumah Tangga	Jumlah perempuan yang berhasil menyelesaikan praktek pelatihan	-	-				80 Orang	80 Orang	100
	Program Keluarga Berencana	**1. Cakupan Peserta KB Aktif**	-	-				**72%**	**72%**	100
		2. Contraceptive Prevalence Rate Moder	-	-				**64,27%**	**64,27%**	100
		3. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	-	-				**2,224%**	**2,224%**	100
	Penyebaran KIE-KKBPK Melalui Kemitraan Dengan Media Massa	Terlaksananya Kegiatan Penyebaran KIE Melalui Kemitraan dengan Media Massa, Media Cetak, Media Elektronik, dan Media Luar Ruangan	-	-				8 Kali	8 Kali	100
	Penyebaran KIE-KKBPK Melalui Sosialisasi Keliling Dengan Pemutaran	Terlaksananya Penyebaran KIE Melalui Sosialisasi Keliling dengan Pemutaran	-	-	-	-	-	7 Kali	7 Kali	100

	Film Ditengah Masyarakat	Film di Tengah Masyarakat								
	Rapat Koordinasi Bidang KB	Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang KB	-	-				60 Orang	60 Orang	100
	Orientasi Pendidik Sebaya Pusat Informasi Konseling-Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-R)	Terlaksananya Layanan Orientasi Pendidik Sebaya Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-R)	-	-				25 Siswa / Mahasiswa	25 Siswa / Mahasiswa	100
	Lomba - lomba dalam rangka hari keluarga nasional	Terlaksananya lomba-lomba Hari Keluarga Nasional	-	-				6 lomba	6 lomba	100
	Pembinaan duta generasi berencana (genre)	Terlaksananya Pembinaan Duta Generasi Berencana	-	-				40 orang	40 orang	100
	Temu Kader KB dalam rangka Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)	Terlaksananya lomba dan temu kader Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional dalam Rangka Harganas Ke XXVIII	-	-				2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
	Pembinaan dan Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Bina Keluarga	-	-				210 orang	210 orang	100
	Genre Saka Kencana	Terlaksananya Genre Saka Kencana	-	-				22 LOKASI	22 LOKASI	100
	Kegiatan Bakti IBI, PKK, TNI, dan Bhayangkara	Terlaksananya Kegiatan Bhakti IBI, PKK dan Bhayangkara	-	-				825 Peserta KB	825 Peserta KB	100
	Pembentukan Kampung Kb Percontohan	Terlaksananya Kegiatan Pembentukan Kampung KB Percontohan	-	-				1 Kampung KB	1 Kampung KB	100

	Pertemuan Monev Grand Design Pembangunan Kependudukan	Terlaksananya Pertemuan Monev Grand Design Pembangunan Kependudukan	-	-				1 Kali	1 Kali	100
	Sosialisasi Kependudukan di Sekolah-Sekolah Kependudukan	Terlaksananya Sosialisasi Kependudukan di Sekolah-Sekolah	-	-				120 Orang	120 Orang	100
	Penyusunan Buku Profil KKBPK	Tersusunnya Buku Profil KKBPK	-	-				100 Buku	100 Buku	100
	Pengukuran Analisis dampak kependudukan	Terlaksananya Pengukuran Analisis Dampak Kependudukan	-	-				15 Dokumen	15 Dokumen	100
	Pengadaan pojok Kependudukan di Sarana Pendidikan	Terlaksananya Pengadaan Pojok Kependudukan di Sarana Pendidikan	-	-				26 Sarana Pendidikan	26 Sarana Pendidikan	100
	Penunjang Pelayanan Keluarga Berencana Balai Penyuluhan Lapangan	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Keluarga Berencana Balai Penyuluh KB	-	-				42 Kelurahan	42 Kelurahan	100
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	**Persentase Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa**						**90%**	**90%**	100
	Pelaksanaan gelar teknologi tepat guna (TTG)	Jumlah Pelaksanaan Lomba TTG Tingkat Kota dan Keikutsertaan dalam gelar TTG Nasional	-	-				2 Kali	2 Kali	100
	Bulan bhakti gotong royong masyarakat	Jumlah pelaksanaan lomba gotong royong tingkat kota dan puncak peringatan BBGRM	-	-				2 Kali	2 Kali	100

	Lomba Kader Umum PKK	Jumlah Pelaksanaan Lomba Kader Umum PKK	-	-				1 Kali	1 Kali	100
	Lomba Pelaksanaan Visual Asam Asetat	Jumlah Pelaksanaan Lomba Visual Asam Asetat	-	-				1 Kali	1 Kali	100
	Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)	Jumlah Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) yang dilaksanakan	-	-				1 Kali	1 Kali	100
	Rakon PKK	Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi PKK Kota Pangkalpinang yang terfasilitasi	-	-				3 kali	3 kali	100
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan yang terkait dengan PKK	-	-				10 kali	10 kali	100
	Lomba Administrasi PKK	Jumlah Pelaksanaan lomba administrasi PKK	-	-				1 kali	1 kali	100
	Lomba UP2K	Jumlah Pelaksanaan Lomba UP2K	-	-				1 kali	1 kali	100
	Pelaksanaan hari kesatuan gerak PKK	Jumlah Pelaksanaan kegiatan HUT HKG Kota Pangkalpinang dan Jambore PKK Tingkat Nasional	-	-				2 kali	2 kali	100
	Lomba Dasawisma	Jumlah Pelaksanaan Lomba Dasawisma	-	-				1 kali	1 kali	100
	Lomba HATINYA PKK	Jumlah pelaksanaan lomba HATINYA PKK	-	-				1 kali	1 kali	100
	Evaluasi perkembangan kelurahan melalui lomba kelurahan	Jumlah lomba kelurahan yang dilaksanakan	-	-				2 jenis	2 jenis	100

	Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan PKK	Jumlah pembinaan rutin dan sosialisasi tentang isu-isu yang berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat	-	-				12 kali	12 kali	100
	Penyelenggaraan Rakon PKK	Jumlah penyelenggaraan Rakon PKK di Pangkalpinang	-	-				1 kali	1 kali	100
	Pendampingan pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan	Jumlah Pendampingan Evaluasi Pada Desa dan Kelurahan	-	-				42 kali	42 kali	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah sesuai tabel T.C30 berikut ini :

TABEL T-C.30
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**											
1	Jumlah OPD yang menjadi sasaran evaluasi PUG di Kota Pangkalpinang			0	0	31 OPD	0	0	0	31 OPD	31 OPD	
2	Jumlah peserta peringatan Hari Anak			0	0	200 orang	0	0	0	200 orang	200 orang	
3	Jumlah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kota Pangkalpinang			0	0	8 PATBM	0	0	0	8 PATBM	10 PATBM	
4	Jumlah peserta Kongres Anak			0	0	80 orang	0	0	0	80 orang	90 orang	
5	Jumlah kasus penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak			0	0	70 kasus	0	0	0	70 kasus	60 kasus	
6	Jumlah peserta Kota Layak Anak (KLA)			0	0	170 orang	0	0	0	170 orang	170 orang	
7	Jumlah Raperda perlindungan anak			0	0	0 raperda	0	0	0	0 raperda	0 raperda	
8	Jumlah pencetakan eksemplar buku Profil Gender			0	0	1 Jenis	0	0	0	1 Jenis	0 Jenis	

9	Jumlah IRT berbasis perempuan sebagai pelaku industri rumahan			0	0	336 IRT	0	0	0	336 IRT	336 IRT	

BIDANG KELUARGA BERENCANA

No	IndikatorKinerjaSesuaiTugas dan FungsiPerangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target CapaianSetiapTahun				RealisasiCapaian		Proyeksi	
				2017	2018	2019	2020	2018	2019	2019	2020
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n	Tahun n+1
	UrusanWajibbukanPelayanan Dasar										
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
	RasioAkseptor KB		%	72,21	74,7	77	80	83	86	89	89
	Lajupertumbuhanpenduduk (LPP)		%	4,17	4,05	3,75	3,45	3,15	2,85	2,55	2,55
	Total Fertility Rate (TFR)		%	2,56	2,38	2,25	2,1	1,95	1,8	1,65	1,65
	Rata-rata jumlahanak per keluarga		orang	3	3	2	2	2	2	2	2

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian Renstra (OPD).

Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

1. Adanya kesenjangan antara kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan program pembangunan.
2. Akurasi Data pendukung perencanaan pembangunan masih sangat lemah.
3. Terbatasnya kemampuan dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan sehingga usulan pembangunan banyak yang belum menyentuh permasalahan yang dihadapi masyarakat.
4. Program dan kegiatan yang direncanakan masih belum disusun berdasarkan pada ketersediaan anggaran.
5. Adanya anggapan atau asumsi bahwa dokumen perencanaan tersebut kurang mengakomodasi kebutuhan yang sebenarnya dari daerah dan antarwilayah.
6. Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarannya.
7. Belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan.

A. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, secara umum berdasarkan hasil analisis diatas, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis, di antaranya sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM perencanaan;

3. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku melanggar (*shortcutting*);
4. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah;
5. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
6. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan;
7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program–program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Proses yang dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan awal RKPD 2020 dengan hasil analisa kebutuhan pada RKPD Perubahan 2020, adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dapat dilihat pada table T-C.31. dibawah ini.

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2020
Kota pangkalpinang

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	**Catatan Penting**
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pk.Pinang**	**Terpenuhinya upaya pelayanan administrasi perkantoran**	**11 upaya**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pk.Pinang**	**Terpenuhinya upaya pelayanan administrasi perkantoran**	**11 upaya**		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pk. Pinang	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6 bulan	114.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pk. Pinang	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6 bulan	114.000.000	
	Penyediaan jasa perkantoran	Pk. Pinang	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Perkantoran	6 bulan	64.440.000	Penyediaan jasa perkantoran	Pk. Pinang	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Perkantoran	6 bulan	71.640.000	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pk. Pinang	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6 bulan	15.000.000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pk. Pinang	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6 bulan	15.000.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi ke luar daerah	Pk. Pinang	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	6 bulan	50.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi ke luar daerah	Pk. Pinang	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	6 bulan	50.000.000	

	Penyediaan makanan dan minuman	Pk. Pinang	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	6 bulan	15.000.000	Penyediaan makanan dan minuman	Pk. Pinang	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	6 bulan	15.000.000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Pembelian ATK	6 bulan	33.767.500	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Pembelian ATK	6 bulan	33.767.500	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pk. Pinang	Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	6 bulan	67.020.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pk. Pinang	Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	6 bulan	70.620.000	
	Penyediaan barang dan cetakan dan penggandaan	Pk. Pinang	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6 bulan	21.932.500	Penyediaan barang dan cetakan dan penggandaan	Pk. Pinang	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6 bulan	20.000.000	
	Penyediaan alat kebersihan kantor	Pk. Pinang	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6 bulan	20.000.000	Penyediaan alat kebersihan kantor	Pk. Pinang	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6 bulan	21.932.500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pk. Pinang	Jumlah layanan penyediaan peralatan rumah tangga yang tertangani	6 bulan	12.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pk. Pinang	Jumlah layanan penyediaan peralatan rumah tangga yang tertangani	6 bulan	12.500.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah waktu penyediaan biaya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 bulan	19.100.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah waktu penyediaan biaya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 bulan	19.100.000	

	Mobilisasi pindah kantor	Pk.Pinang	Frekuensi terlaksananya mobilisasi pindah kantor	1 kali	5.400.000	Mobilisasi pindah kantor	Pk.Pinang	Frekuensi terlaksananya mobilisasi pindah kantor	1 kali	5.400.000	
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	22 Unit, 8 Buah	136.500.000	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	22 Unit, 8 Buah	136.500.000	
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**5 upaya**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**5 upaya**		
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia	35 Buah, 1 Paket, 4 Set, 25 Meter, 10 Unit	103.950.000	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia	35 Buah, 1 Paket, 4 Set, 25 Meter, 10 Unit	103.950.000	
	Kegiatan Pengadaan Mebeleur		Jumlah mebeleur yang tersedia	5 Set, 220 Buah	374.150.000	Kegiatan Pengadaan Mebeleur		Jumlah mebeleur yang tersedia	5 Set, 220 Buah	374.150.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin/Berkala	4 unit	28.820.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin/Berkala	4 unit	33.820.000	
III	**Program**		**Jumlah laporan**	**6**		**Program**		**Jumlah laporan**	**6**		

	peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		**capaian kinerja dan keuangan**	**dokumen**		**peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**		**capaian kinerja dan keuangan**	**dokumen**		
	Penyusunan Renja (RKT, RKA, DPA)	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Renja, RKA dan DPA yang disusun	6 dokumen	3.000.000	Penyusunan Renja (RKT, RKA, DPA)	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Renja, RKA dan DPA yang disusun	6 dokumen	3.000.000	
IV	**Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		**Skor nilai KLA**	**60**		**Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		**Skor nilai KLA**	**60**		
	Fasilitasi Layanan Penanganan Kasus Perempuan dan Anak	Pk. Pinang	Jumlah Kasus Penanganan Terhadap Perempuan dan Anak.	70 Kasus	45.598.300	Fasilitasi Layanan Penanganan Kasus Perempuan dan Anak	Pk. Pinang	Jumlah Kasus Penanganan Terhadap Perempuan dan Anak.	70 Kasus	59.713.300	
	Penyusunan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pk. Pinang	Tersusunnya Raperda pemberdayaan dan perlindungan perempuan	1 Raperda	1.900.360	Penyusunan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pk. Pinang	Tersusunnya Raperda pemberdayaan dan perlindungan perempuan	1 Raperda	1.900.360	
V	**Program Keluarga Berencana**		**1. Cakupan Peserta KB Aktif**	**71%**		**Program Keluarga Berencana**		**1. Cakupan Peserta KB Aktif**	**71%**		
			2. Contraceptive	**63,49%**				**2. Contraceptive**	**63,49%**		

			Prevalence Rate Moder					**Prevalence Rate Moder**			
			3. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	**2.229%**				**3. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)**	**2.229%**		
	Penyebaran KIE-KKBPK Melalui Kemitraan Dengan Media Massa	Pk. Pinang	Jumlah KIE – KKBPK Melalui Media Elektronik dan Media Cetak	8 Kali	27.438.608	Penyebaran KIE-KKBPK Melalui Kemitraan Dengan Media Massa	Pk. Pinang	Jumlah KIE – KKBPK Melalui Media Elektronik dan Media Cetak	8 Kali	27.438.608	
	Bantuan Operasional Keluarga Berencana		Jumlah waktu layanan yang diberikan bantuan operasional keluarga berencana	6 Bulan	266.678.897	Bantuan Operasional Keluarga Berencana		Jumlah waktu layanan yang diberikan bantuan operasional keluarga berencana	6 Bulan	266.678.897	
	Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi		Jumlah fasilitas kesehatan yang didistribusi alat dan obat kontrasepsi	18 Faskes	28.086.000	Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi		Jumlah fasilitas kesehatan yang didistribusi alat dan obat kontrasepsi	18 Faskes	28.086.000	
	Integrasi Kampung Keluarga Berencana		Jumlah Kampung KB yang menjadi sasaran	12 Kampung KB	425.390.000	Integrasi Kampung Keluarga Berencana		Jumlah Kampung KB yang menjadi sasaran	12 Kampung KB	425.390.000	
	Pembangunan / Alih Fungsi/ Pengembangan Balai Penyuluh KB		Jumlah Balai Penyuluh KB yang Dibangun	1 Balai Penyuluh KB	370.204.000	Pembangunan/ Alih Fungsi/ Pengembangan Balai Penyuluh KB		Jumlah Balai Penyuluh KB yang Dibangun	1 Balai Penyuluh KB	370.204.000	
	Orientasi Pendidik		Jumlah Siswa SMA/SMK dan	25 Siswa/	1.000	Orientasi Pendidik Sebaya		Jumlah Siswa SMA/SMK dan	25 Siswa/M	1.000	

	Sebaya Pusat Informasi Konseling/ Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-R)		Mahasiswa yang menjadi Pendidik Sebaya PIK-R yang terlatih	Mahasis wa		Pusat Informasi Konseling/ Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-R)		Mahasiswa yang menjadi Pendidik Sebaya PIK-R yang terlatih	ahasiswa		
	Pembinaan Program Oleh Kader		Jumlah waktu layanan pembinaan program oleh kader	6 Bulan	21.000.000	Pembinaan Program Oleh Kader		Jumlah waktu layanan pembinaan program oleh kader	6 Bulan	21.000.000	
	Dukungan Media KIE dan Manajemen BOK		Jumlah alat/ media KIE yang disediakan	9 Jenis	112.840.000	Dokumen Media KIE dan Manajemen BOK		Jumlah alat/ media KIE yang disediakan	9 Jenis	112.840.000	
	Penunjang Pelayanan Keluarga Berencana Balai Penyuluhan Lapangan		Jumlah kelurahan yang mendapat pelayanan KB	42 Kelura-han	197.850.000	Penunjang Pelayanan Keluarga Berencana Balai Penyuluhan Lapangan		Jumlah kelurahan yang mendapat pelayanan KB	42 Kelura-han	218.250.000	
	Pembangunan/ Alih Fungsi/ Rehab/ Pengembangan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi		Terlaksananya rehab/ pengembangan gudang alat dan obat kontrasepsi	1 Paket	265.154.000	Pembangunan/ Alih Fungsi/ Rehab/ Pengembangan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi		Terlaksananya rehab/ pengembangan gudang alat dan obat kontrasepsi	1 Paket	265.154.000	
	Pengadaan Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan		Terlaksananya Pengadaan Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan	15 Paket	78.196.000	Pengadaan Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan		Terlaksananya Pengadaan Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan	15 Paket	78.196.000	
	Pengadaan		Terlaksananya	3 Jenis	145.739.000	Pengadaan		Terlaksananya	3 Jenis	145.739.000	

	Media/ Alat Pengolah Data		Pengadaan Media/ Alat Pengolah Data			Media/ Alat Pengolah Data		Pengadaan Media/ Alat Pengolah Data			
	Pengembangan Balai Penyuluh KB		Terlaksananya Pengembangan Balai Penyuluh KB	5 Jenis	84.362.000	Pengembangan Balai Penyuluh KB		Terlaksananya Pengembangan Balai Penyuluh KB	5 Jenis	84.362.000	
	Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB		Terlaksananya Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB	35 Unit	144.319.000	Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB		Terlaksananya Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB	35 Unit	144.319.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Percontohan		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	5 Jenis	24.571.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Percontohan		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	5 Jenis	24.571.000	
VI	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Pk. Pinang**	**Persentase Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa**	**85%**		**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	Pk. Pinang	**Persentase Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa**	**85%**		
	Rakon PKK	Pk .Pinang	Jumlah Rapat konsultasi dan koordinasi PKK Kota Pangkalpinang yang terfasilitasi	2 Kali	30.000.000	Rakon PKK	Pk .Pinang	Jumlah Rapat konsultasi dan koordinasi PKK Kota Pangkalpinang yang terfasilitasi	2 Kali	30.000.000	
	Lomba Kader Umum PKK	Pk. Pinang	Jumlah Pelaksanaan Lomba Kader Umum PKK	1 Kali	233.700	Lomba Kader Umum PKK	Pk. Pinang	Jumlah Pelaksanaan Lomba Kader Umum PKK	1 Kali	233.700	
	Monitoring, Evaluasi dan	Pk. Pinang	Jumlah pelaksanaan monitoring,	6 Kali	34.650.000	Monitoring, Evaluasi dan	Pk. Pinang	Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi	6 Kali	38.250.000	

	Pelaporan Kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan		evaluasi dan pelaporan kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan			Pelaporan Kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan		dan pelaporan kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan			
	Evaluasi perkembangan kelurahan melalui lomba kelurahan	Pk. Pinang	Jumlah lomba kelurahan yang dilaksanakan	2 jenis	1.000	Evaluasi perkembangan kelurahan melalui lomba kelurahan	Pk. Pinang	Jumlah lomba kelurahan yang dilaksanakan	2 jenis	1.000	
	Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan PKK	Pk. Pinang	Jumlah pembinaan rutin dan sosialisasi tentang isu-isu yang berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat	6 Kali	49.900.000	Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan PKK	Pk. Pinang	Jumlah pembinaan rutin dan sosialisasi tentang isu-isu yang berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat	6 Kali	49.900.000	
					3.454.907.865					3.492.107.865	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 2004, penyusunan RKPD mangacu pada RPJMD dan RPJMN. Dalam RPJMN 2019 – 2024, telah menetapkan Visi Presiden terpilih yaitu :

1. Mempercepat dan melanjutkan membangun infrastruktur.
   Interkoneksi infrastruktur dengan kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan.

2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
   - Menjamin kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah
   - Meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta

3. Undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan.
   Memangkas hambatan investasi

4. Reformasi Birokrasi.
   - Kecepatan melayani dan member izin
   - Menghapus pola fikir linear, monoton dan terjebak zona aman
   - Adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif

5. APBN yang focus dan tepat sasaran
   APBN dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan Visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalahsebagaiberikut:

MEWUJUDKAN PANGKALPINANG SEBAGAI KOTA SENYUM (SEJAHTERA NYAMAN UNGGUL DAN MAKMUR)

FraseVisi:

Sejahtera : amansentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macamb gangguan)

Nyaman : segar; sehat; kenyamanan → rasa nyaman

Unggul : lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain; utama

Makmur : banyak hasil; serba berkecukupan; tidak kekurangan

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

- **Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.**
  Misi ini akan menjadi payung dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PMKS sesuai standar pelayanan.

- **Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.**

  Pada misi ini Kota Pangkalpinang akan meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.

- **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*.**

  Pada misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yan baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-goverment* (*e-planning*, *e-budgeting*, *e-sakip,* e-monitoring evaluasi, dan *e-procurement*)

- **Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan.**

  Pada misi ini Pemerintah Kota Pangkalpinang akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta pelestarian seni dan kebudayaan.

- **Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.**

  Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektifitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mengarah pada pencapaian unsur visi: *NYAMAN dan UNGGUL*. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-3 yaitu : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance dan misi ke-4 yaitu: Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD yaitu :

Tujuan :

1. Meningkatkan keberdayaan perempuan dalam pengarusutamaan gender;
2. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
3. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

Sasaran :

1. Meningkatnya kelembagaan PUG dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender;
2. Meningkatnya keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif;
3. Meningkatnya penanganan kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO;
4. Meningkatnya pendapatan perempuan;
5. Meningkatnya upaya penurunan angka kelahiran;

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan keberdayaan perempuan dalam pengarusutamaan Gender									
		Meningkatnya kelembagaan PUG dalam mencapai kesetaraan dan keadilan Gender	Rasio ARG terhadap APBD	Jumlah anggaran responsive gender : total APBD x 100	Rasio		10	10	14	15
2	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak									
		Meningkatnya keterwakilan politik perempuan di lembaga legislative	Persentase perempuan di legislative	Jumlah perempuan di legislative : caleg x 100	%		16,7	16,7	16,7	16,7
		Meningkatnya penanganan kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Jumlah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan : jumlah perempuan dan anak x 100	%		0,05	0,03	0,01	0
		Meningkatnya pendapatan perempuan	Kontribusi pendapatan perempuan terhadap laki-laki							
3	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk									
		Meningkatnya upaya penurunan angka kelahiran	Total Fertility Rate		%		2,10	1,95	1,80	1,65

3.4 Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegritasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

a. RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi.
b. Adanya Visi dan Misi Walikota Pangkalpinang
c. RPJMD dan RKPD
d. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
e. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Adapun program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan tahun 2020 dijabarkan dalam 6 (enam) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
   b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
   c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
   e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
   f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   h. Peyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
   i. Penyediaan Makanan dan Minuman
   j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
   k. Penyediaan Jasa Perkantoran
   l. Mobilisasi pindah kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   b. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
   c. Pengadaan Mebeleur
   d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   a. Penyusunan RENJA (RKT, RKA, DPA)

4. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   a. Penyusunan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
   b. Fasilitasi Layanan Penanganan Kasus Perempuan dan Anak

5. Program Keluarga Berencana
   a. Penyebaran KIE-KKBPK Melalui Kemitraan Dengan Media Massa
   b. Bantuan Operasional Keluarga Berencana
   c. Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
   d. Integrasi Kampung Keluarga Berencana
   e. Pembangunan/ Alih Fungsi/ Pengembangan Balai Penyuluh KB
   f. Orientasi Pendidik Sebaya Pusat Informasi Konseling/ Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-R)
   g. Pembinaan Program Oleh Kader
   h. Dukungan Media KIE dan Manajemen BOK
   i. Penunjang Pelayanan Keluarga Berencana Balai Penyuluhan Lapangan
   j. Pembangunan/ Alih Fungsi/ Rehab/ Pengembangan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi
   k. Pengadaan Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan
   l. Pengadaan Media/ Alat Pengolah Data
   m. Pengembangan Balai Penyuluh KB
   n. Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB
   o. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Percontohan

6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
   a. Lomba Kader Umum PKK

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan
c. Evaluasi Perkembangan Kelurahan Melalui Lomba Kelurahan
d. Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan PKK
e. Rakon PKK

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2020 terlampir dalam Tabel T-C.33. di bawah ini.

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana dan Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Tahun 2020
Dan Prakiraan Maju Tahun 2021

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terpenuhinya upaya pelayanan administrasi perkantoran**		**11 upaya**	**585.460.000**			**11 upaya**	**958.569.997**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pk. Pinang	6 bulan	114.000.000	PAD		12 bulan	151.770.000
	Penyediaan jasa perkantoran	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Perkantoran	Pk. Pinang	6 bulan	71.640.000	PAD		12 bulan	261.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pk. Pinang	6 bulan	15.000.000	PAD		12 bulan	26.743.210
	Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi ke luar daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pk. Pinang	6 bulan	50.000.000	PAD		12 bulan	120.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	Pk. Pinang	6 bulan	15.000.000	PAD		12 bulan	18.020.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Pembelian ATK	Pk. Pinang	6 bulan	33.767.500	PAD		12 bulan	41.926.245

	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	Pk. Pinang	6 bulan	70.620.000	PAD		12 bulan	149.120.000
	Penyediaan barang dan cetakan dan penggandaan	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pk. Pinang	6 bulan	20.000.000	PAD		12 bulan	15.000.000
	Penyediaan alat kebersihan kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pk. Pinang	6 bulan	21.932.500	PAD		12 bulan	34.068.860
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Layanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Tertangani	Pk. Pinang	6 bulan	12.500.000	PAD		12 bulan	10.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pk. Pinang	6 bulan	19.100.000	PAD		12 bulan	10.000.000
	Mobilisasi Pindah Kantor	Frekuensi Terlaksananya Mobilisasi Pindah Kantor	Pk. Pinang	1 Kali	5.400.000	PAD		-	-
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Pk. Pinang	22 Unit, 8 Buah	136.500.000	PAD			
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasana aparatur**		**5 upaya**	**511.920.000**			**5 upaya**	**65.550.000**
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Pk. Pinang	35 Buah, 1 Paket, 4 Set, 25 Meter, 10 Unit	103.950.000	PAD		30 unit	63.300.000

	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang tersedia	Pk. Pinang	220 Buah, 5 Set	374.150.000	PAD			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung/Bangunan/Prasarana Kantor yang Mendapat Pemeliharaan Rutin Berkala						1 unit	2.250.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin/Berkala	Pk. Pinang	4 Unit	33.820.000	PAD		4 unit	120.921.682
III	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan**		**6 dokumen**	**3.000.000**			**6 dokumen**	**15.488.000**
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusun laporan						1 dokumen	4.037.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusun laporan						1 dokumen	3.707.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusun laporan						1 dokumen	3.707.000
	Penyusunan Renja (RKT, RKA, DPA)	Jumlah Laporan Renja, RKA dan DPA yang disusun	Pk. Pinang	6 dokumen	3.000.000	PAD		1 dokumen	4.037.000
IV	**Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**Skor nilai KLA**		**60 Score**	**61.613.660**			**70 Score**	**995.027.500**
	Penyusunan Raperda	Raperda pemberdayaan		1 Raperda	1.900.360	PAD			

	Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	dan perlindungan perempuan							
	Sosialisasi Perda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Jumlah Peserta Sosialisasi						100 Orang	38.397.500
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan di Kota Pangkalpinang						30 Organisasi	71.880.000
	Fasilitasi Pengembangan Industri Rumahan	Jumlah IR yang Diberdayakan						336 IR	45.000.000
	Peringatan Hari Anak	Terlaksananya Peringatan Hari Anak.						200 Orang	73.000.000
	Pengembangan Forum Anak Skala Kota	Jumlah Peserta Kongres						90 Orang	75.000.000
	Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah Kecamatan Prioritas Program KLA.						7 Kecamatan	35.000.000
	Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Meningkatnya kapasitas PATBM						10 PATBM	40.000.000
	Fasilitasi Layanan Penanganan Kasus Perempuan dan Anak	Jumlah Kasus Penanganan Terhadap Perempuan dan Anak.	Pk. Pinang	70 Kasus	59.713.300	PAD		60 Kasus	150.000.000
	Evaluasi Pelaksanaan PUG	Status Capaian PUG (APE)						1 Status	40.000.000
	Workshop PPRG Bagi Perencana OPD	Jumlah OPD yang Menyusun GAP dan GBS.						31 OPD	70.000.000
	Penyediaan Sistem Basis Data Gender dan Anak	Tersedianya Sistem Basis Data dan Gender						1 Sistem	110.000.000

	Sosialisasi Perda KLA	Jumlah Peserta Sosialisasi						100 Orang	26.700.000
	Pelatihan PPRG Bagi Aparatur Perencana di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang menyusun GAP dan GBS						20 Kel	30.000.000
	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PUG	Jumlah lembaga yang dikuatkan						1 Lembaga	60.000.000
	Fasilitasi Pembentukan Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Terbentuknya Forum KKG						1 Unit	40.000.000
	Rakor PUG	Jumlah Rakor PUG yang dilaksanakan						31 OPD	30.000.000
	Pendampingan Perempuan Untuk Pengembangan Ekonomi Rumah Tangga	Jumlah perempuan yang berhasil menyelesaikan praktek pelatihan						80 Orang	60.050.000
V	**Program Keluarga Berencana**	**1. Cakupan Peserta KB Aktif**		**71%**	**2.212.229.505**			**72%**	**1.456.664.900**
		2. Contraceptive Prevalence Rate Moder		**63,49%**				**64,27%**	
		3. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		**2.229%**				**2.224%**	
	Penyebaran KIE-KKBPK Melalui Kemitraan Dengan Media Massa	Jumlah KIE- KKBPK Melalui Media Elektronik dan Media Cetak	Pk. Pinang	8 Kali	27.438.608	PAD		8 Kali	60.000.000
	Penyebaran KIE-KKBPK Melalui Sosialisasi Keliling Dengan Pemutaran Film Ditengah Masyarakat	Terlaksananya Penyebaran KIE melalui Sosialisasi Keliling dengan Pemutaran Film di Tengah Masyarakat						7 Kali	32.000.000

	Rapat Koordinasi Bidang KB	Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang KB						60 Orang	63.389.000
	Orientasi Pendidik Sebaya Pusat Informasi Konseling-Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-R)	Jumlah siswa SMA/SMK dan mahasiswa yang menjadi pendidik sebaya PIK-R yang terlatih	Pk. Pinang	25 Siswa / Mahasiswa	1.000	PAD		25 Siswa / Maha-siSwa	40.754.000
	Lomba - lomba dalam rangka hari keluarga nasional	Terlaksananya Lomba-Lomba Hari Keluarga Nasional						6 lomba	49.784.392
	Pembinaan duta generasi berencana (genre)	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Duta Generasi Berencana						40 orang	99.395.900
	Temu Kader KB dalam rangka Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)	Terlaksananya lomba dan temu kader Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional dalam Rangka Harganas Ke XXVIII						2 Kegiatan	162.430.000
	Pembinaan dan Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Bina Keluarga						210 orang	32.565.608
	Genre Saka Kencana	Terlaksananya Kegiatan Genre Saka Kencana						22 LOKASI	36.000.000
	Kegiatan Bakti IBI, PKK, TNI, dan Bhayangkara	Terlaksananya Kegiatan Bhakti IBI, PKK dan Bhayangkara						825 Peserta KB	244.235.000
	Pembentukan Kampung Kb Percontohan	Terlaksananya Kegiatan Pembentukan Kampung KB Percontohan						1 Kampung KB	39.847.000
	Pertemuan Monev Grand Design	Terlaksananya Pertemuan						1 Kali	16.900.000

	Pembangunan Kependudukan	Monev Grand Design Pembangunan Kependuduk							
	Sosialisasi Kependudukan di Sekolah-Sekolah Kependudukan	Terlaksanannya Sosialisasi Kependudukan di Sekolah-Sekolah						120 Orang	18.338.500
	Penyusunan Buku Profil KKBPK	Tersusunnya Penyusunan Buku Profil KKBPK						100 Buku	28.016.000
	Pengukuran Analisis dampak kependudukan	Terlaksananya Pengukuran Analisis Dampak Kependudukan						15 Dokumen	38.455.250
	Pengadaan pojok Kependudukan di Sarana Pendidikan	Terlaksananya Pengadaan Pojok Kependudukan di Sarana Pendidikan						26 Sarana Pendidikan	53.054.250
	Penunjang Pelayanan Keluarga Berencana Balai Penyuluhan Lapangan	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan KB	Pk. Pinang	42 Kelurahan	218.250.000	PAD		42 Kelurahan	441.500.000
	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Jumlah waktu layanan yang diberikan bantuan operasional keluarga berencana	Pk. Pinang	6 Bulan	266.678.897	DAK			
	Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi	Jumlah fasilitas kesehatan yang didistribusi alat dan obat kontrasepsi	Pk. Pinang	18 Faskes	28.086.000	DAK			
	Integrasi Kampung Keluarga Berencana	Jumlah Kampung KB yang menjadi sasaran	Pk. Pinang	12 Kampung KB	425.390.000	DAK			
	Pembangunan/ Alih Fungsi/	Jumlah Balai Penyuluh KB	Pk. Pinang	1 Balai	370.204.000	DAK			

	Pengembangan Balai Penyuluh KB	yang Dibangun		Penyuluh KB					
	Pembinaan Program Oleh Kader	Jumlah waktu layanan pembinaan program oleh kader	Pk. Pinang	6 Bulan	21.000.000	DAK			
	Dokungan Media KIE dan Manajemen BOK	Jumlah alat/ media KIE yang disediakan	Pk. Pinang	9 Jenis	112.840.000	DAK			
	Pembangunan/ Alih Fungsi/ Rehab/ Pengembangan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi	Terlaksananya Rehab/ Pengembangan Gudang Alat Kontrasepsi	Pk. Pinang	1 Paket	265.154.000	DAK			
	Pengadaan Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan	Pk. Pinang	15 Paket	78.196.000	DAK			
	Pengadaan Media/ Alat Pengolah Data	Terlaksananya Pengadaan Media/ Alat Pengolah Data	Pk. Pinang	3 Jenis	145.739.000	DAK			
	Pengembangan Balai Penyuluh KB	Terlaksananya Pengembangan Balai Penyuluh KB	Pk. Pinang	5 Jenis	84.362.000	DAK			
	Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB	Terlaksananya Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB	Pk. Pinang	35 Unit	144.319.000	DAK			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Percontohan	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	Pk. Pinang	5 Jenis	24.571.000	DAK			
VI	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Persentase Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa**		**85%**	**117.884.700**			**90%**	**1.404.654.500**
	Pelaksanaan gelar teknologi	Jumlah Pelaksanaan Lomba						2 Kali	56.135.000

	tepat guna (TTG)	TTG Tingkat Kota dan Keikutsertaan dalam gelar TTG Nasional							
	Bulan bhakti gotong royong masyarakat	Jumlah pelaksanaan lomba gotong royong tingkat kota dan puncak peringatan BBGRM						2 Kali	160.160.000
	Lomba Kader Umum PKK	Jumlah Pelaksanaan Lomba Kader Umum PKK	Pk. Pinang	1 Kali	233.700	PAD		1 Kali	24.739.500
	Lomba Pelaksanaan Visual Asam Asetat	Jumlah Pelaksanaan Lomba Visual Asam Asetat						1 Kali	47.105.000
	Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)	Jumlah Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) yang dilaksanakan						1 Kali	49.830.000
	Rakon PKK	Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi PKK Kota Pangkalpinang yang terfasilitasi	Pk. Pinang	2 Kali	30.000.000	PAD		3 kali	52.095.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan	Pk. Pinang	6 Kali	38.250.000	PAD		10 kali	113.840.000
	Lomba Administrasi PKK	Jumlah Pelaksanaan lomba administrasi PKK						1 kali	40.350.000
	Lomba UP2K	Jumlah Pelaksanaan Lomba UP2K						1 kali	53.985.000
	Pelaksanaan hari kesatuan	Jumlah Pelaksanaan						2 kali	298.720.000

	gerak PKK	kegiatan HUT HKG Kota Pangkalpinang dan Jambore PKK Tingkat Nasional							
	Lomba Dasawisma	Jumlah Pelaksanaan Lomba Dasawisma						1 kali	29.950.000
	Lomba HATINYA PKK	Jumlah pelaksanaan lomba HATINYA PKK						1 kali	27.675.000
	Evaluasi perkembangan kelurahan melalui lomba kelurahan	Jumlah lomba kelurahan yang dilaksanakan	Pk. Pinang	2 Jenis	1.000	PAD		2 jenis	125.000.000
	Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan PKK	Jumlah pembinaan rutin dan sosialisasi tentang isu-isu yang berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat	Pk. Pinang	6 Kali	49.400.000	PAD		12 kali	180.070.000
	Penyelenggaraan Rakon PKK	Jumlah penyelenggaraan Rakon PKK di Pangkalpinang						1 kali	100.000.000
	Pendampingan Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Jumlah pendampingan evaluasi pada desa dan kelurahan						42 Kali	45.000.000
					3.492.107.865				**4.895.954.897**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Agenda Kerja Penyiapan Dokumen Penyusunan rencana kerja perlu dilakukan sebagai acuan bagi tim penyusun dalam proses penyiapannya. Rencana kerja mengatur rincian kegiatan apa yang perlu dilakukan (termasuk seluruh kegiatan musrenbang dan forum SKPD), siapa yang melakukan, metode pelaksanaannya bagaimana, serta kapan kegiatan tersebut akan dilakukan. Langkah-langkah penyusunan rencana kerja secara umum adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rincian agenda kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan dokumen RKPD dan memberi catatan batas waktu (deadline) pada kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangan.

2. Merumuskan keluaran/output serta metoda pelaksanaan dari setiap rincian kegiatan tersebut.

3. Menyusun matrik rencana kerja yang berisikan rincian kegiatan, keluaran, metoda dan jadwal pelaksanaan.

Pengumpulan Data dan Informasi Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung dengan data dan informasi yang memadaidan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dikumpulkan sedemikian rupa sehingga memperlihatkan secara jelas status, kedudukan,capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah.

Penyiapan Daftar Isi Dokumen RKPD merupakan dokumen yang menjabarkan rencana jangka menengah daerah ke dalam rencana tahunan dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan tahunan, sehingga akan dijadikan acuan bagi proses penyusunan RAPBD, mulai dari perumusan Kebijakan Umum APBD, penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran hingga penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD. Oleh karena itu substansi RKPD seyogyanya mampu menjawab kebutuhan materi bagi proses perencanaan dan penganggaran. Substansi utama yang termuat dalam rancangan awal RKPD, meliputi:

a. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu
b. Rancangan kerangka ekonomi daerah
c. Arah kebijakan keuangan daerah, termasuk indikasi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

d. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah
e. Rencana program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif SKPD.

Informasi pagu indikatif bagi setiap SKPD dan indikasi belanja bagi hasil serta belanja bantuan keuangan merupakan informasi yang harus disampaikan dalam rancangan awal RKPD. Ketersediaan informasi ini akan sangat dibutuhkan oleh setiap SKPD sebagai acuan dalam merumuskan rancangan rencana kerja SKPD. Pagu indikatif SKPD dan indikasi belanja hibah dan belanja bantuan keuangan tersebut juga berfungsi sebagai koridor pendanaan dalam pembahasan forum SKPD maupun dalam pelaksanaan musrenbang, sehingga proses pelaksanaan musrenbang menjadi lebih efektif dan efisien.

Pengalokasian besaran pagu indikatif berorientasi pada asas pemenuhan kebutuhan, efisiensi, keadilan, dan penilaian kinerja, serta sinergi sumber-sumber pendanaan. Perhitungan pagu indikatif anggaran program dan kegiatan yang dialokasikan bagi setiap SKPD didasarkan pada kebutuhan SKPD untuk melaksanakan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah prioritas sesuai tingkat dan sasaran pelayanan program dan kegiatan.

Penyusunan rancangan awal RKPD dapat dimulai segera setelah dicapainya persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Ranperda APBD untuk pelaksanaan tahun sebelumnya .

Dari langkah-langkah diatas maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah menyiapkan Rencana Kerja tahun 2020 seperti tabel berikut.

Tabel T-C. 34
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2020

No	Prioritas Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Organisasi	Jumlah Plafond
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terpenuhinya upaya pelayanan administrasi perkantoran**	**11 upaya**	**DPPPAKB**	**585.460.000**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6 bulan	DPPPAKB	114.000.000
	Penyediaan jasa perkantoran	Tersedianya jasa perkantoran	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Perkantoran	6 bulan	DPPPAKB	71.640.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6 bulan	DPPPAKB	15.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi ke luar daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	6 bulan	DPPPAKB	50.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	6 bulan	DPPPAKB	15.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Pembelian ATK	6 bulan	DPPPAKB	33.767.500
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	6 bulan	DPPPAKB	70.620.000
	Penyediaan barang dan cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6 bulan	DPPPAKB	20.000.000
	Penyediaan alat kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6 bulan	DPPPAKB	21.932.500

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Layanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Tertangani	6 bulan	DPPPAKB	12.500.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	Jumlah waktu penyediaan biaya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	6 bulan	DPPPAKB	19.100.000
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	22 Unit, 8 Buah	DPPPAKB	136.500.000
	Mobilisasi Pindah Kantor	Terlaksananya mobilisasi pindah kantor	Frekuensi terlaksananya mobilisasi pindah kantor	1 kali	DPPPAKB	5.400.000
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**5 upaya**	**DPPPAKB**	**511.920.000**
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia	35 Buah, 1 Paket, 4 Set,25 Meter, 10 Unit	DPPPAKB	103.950.000
	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Meubeleur	Jumlah mebeleur yang tersedia	5 Set, 220 Buah	DPPPAKB	374.150.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin/Berkala	4 unit	DPPPAKB	33.820.000
III	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Tersedianya Sistem Laporan Capaian Kinerja dan system**	**Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan**	**6 dokumen**		**3.000.000**
	Penyusunan Renja (RKT, RKA, DPA)	Tersusunnya Penyusunan Renja (RKT, RKA, DPA)	Jumlah Laporan Renja, RKA dan DPA yang disusun	6 dokumen	DPPPAKB	3.000.000

IV	**Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**Meningkatnya upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**Skor nilai KLA**	**60**		**61.613.660**
	Penyusunan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Tersusunnya Raperda pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	1 Raperda	DPPPAKB	1.900.360
	Fasilitasi Layanan Penanganan Kasus Perempuan dan Anak	Terlaksananya penanganan kasus terhadap perempuan dan anak	Jumlah Kasus Penanganan Terhadap Perempuan dan Anak	70 Kasus	DPPPAKB	59.713.300
V	**Program Keluarga Berencana**	**Meningkatnya upaya penurunan angka kelahiran**	**1. Cakupan Peserta KB Aktif**	**71%**	DPPPAKB	**2.212.229.505**
			2. Contraceptive Prevalence Rate Moder	**63,49%**	DPPPAKB	
			3. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	**2.229%**	DPPPAKB	
	Penyebaran KIE-KKBPK Melalui Kemitraan Dengan Media Massa	Terlaksananya Kegiatan Penyebaran KIE-KKBPK Melalui Kemitraan Dengan Media Massa	Jumlah KIE-KKBPK Melalui Media Elektronik dan Media Cetak	8 Kali	DPPPAKB	27.438.608
	Orientasi Pendidik Sebaya Pusat Informasi Konseling-Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-R)	Terlaksananya Layanan Orientasi Pendidik Sebaya Pusat Informasi Konseling-Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-R)	Jumlah siswa SMA/SMK dan mahasiswa yang menjadi pendidik sebaya PIK-R yang terlatih	25 Siswa / Mahasiswa	DPPPAKB	1.000
	Penunjang Pelayanan Keluarga Berencana Balai Penyuluhan Lapangan	Terlaksananya pelayanan KB	Jumlah kelurahan yang mendapat pelayanan KB	42 Kelurahan	DPPPAKB	218.250.000
	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Terlaksananya Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Jumlah waktu layanan yang diberikan bantuan operasional keluarga berencana	6 Bulan	DPPPAKB	266.678.897
	Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi	Terlaksananya Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi	Jumlah fasilitas kesehatan yang didistribusi alat dan obat kontrasepsi	18 Faskes	DPPPAKB	28.086.000
	Integrasi Kampung Keluarga	Terlaksananya Integrasi di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang menjadi sasaran	12 Kampung	DPPPAKB	425.390.000

	Berencana	di Setiap Kecamatan		KB		
	Pembangunan/ Alih Fungsi/ Pengembangan Balai Penyuluh KB	Terlaksananya Pembangunan Balai Penyuluh KB Baru	Jumlah Balai Penyuluh KB yang Dibangun	1 Balai Penyuluh KB	DPPPAKB	370.204.000
	Pembinaan Program Oleh Kader	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Program Oleh Kader	Jumlah waktu layanan pembinaan program oleh kader	6 Bulan	DPPPAKB	21.000.000
	Dukungan Media KIE dan Manajemen BOK	Terlaksananya Dukungan Media KIE dan Manajemen BOK	Jumlah alat/ media KIE yang disediakan	9 Jenis	DPPPAKB	112.840.000
	Pembangunan/ Alih Fungsi/ Rehab/ Pengembangan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi	Jumlah Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi yang di Rehab/ Pengembangan	Terlaksananya rehab/ pengembangan gudang alat dan obat kontrasepsi	1 Paket	DPPPAKB	265.154.000
	Pengadaan Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan	Jumlah Alat Yang Disediakan	Terlaksananya pengadaan sarana KIE KIT dan media lini lapangan	15 Paket	DPPPAKB	78.196.000
	Pengadaan Media/ Alat Pengolah Data	Jumlah Alat Yang Tersedia	Terlaksananya pengadaan media/ alat pengolah data	3 Jenis	DPPPAKB	145.739.000
	Pengembangan Balai Penyuluh KB	Jumlah Alat Yang Tersedia	Terlaksananya pengembangan balai penyuluh KB	5 Jenis	DPPPAKB	84.362.000
	Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB	Jumlah Alat Yang Tersedia	Terlaksananya pengadaan sarana petugas lapangan KB	35 Unit	DPPPAKB	144.319.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Percontohan	Jumlah Alat Yang Disediakan	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana rumah data kependudukan di kampung KB	5 Jenis	DPPPAKB	24.571.000
VI	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Persentase Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa**	**85%**	**DPPPAKB**	**117.884.700**

	Lomba Kader Umum PKK	Terlaksananya Lomba Kader Umum PKK	Jumlah Pelaksanaan Lomba Kader Umum PKK	1 Kali	DPPPAKB	233.700
	Rakon PKK	Terlaksananya Rakon PKK	Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi PKK Kota Pangkalpinang yang terfasilitasi	2 Kali	DPPPAKB	30.000.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan	6 kali	DPPPAKB	38.250.000
	Evaluasi perkembangan kelurahan melalui lomba kelurahan	Terlaksananya Evaluasi perkembangan kelurahan melalui lomba kelurahan	Jumlah lomba kelurahan yang dilaksanakan	2 jenis	DPPPAKB	1.000
	Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan PKK	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan PKK	Jumlah pembinaan rutin dan sosialisasi tentang isu-isu yang berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat	6 kali	DPPPAKB	49.400.000
					JUMLAH	**3.492.107.865**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat dari program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen renstra. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang yang terkait langsung dengan prioritas pembangunan pada tahun tertentu, maka kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang diprioritaskan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang pada tahun tersebut harus mencerminkan pencapaian prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Pangkalpinang tahun 2020. Untuk kegiatan yang diprioritaskan tersebut harus disertai dengan kebutuhan anggaran yang dirinci kedalam volume dan satuan harga. Dengan demikian, penentuan alokasi anggaran kepada kegiatan-kegiatan prioritas dapat dilakukan secara terukur.

Secara garis besar, rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang tahun 2020 memuat 6 (enam) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan dengan besaran atau total biaya yakni kurang lebih sebesar Rp **3.492.107.865.** Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang tahun 2020 diarahkan untuk mencapai beberapa misi Pemerintah Kota sebagaimana penjelasan sebelumnya dengan mengacu pada sasaran strategis serta program prioritas.